BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Umum Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *co-operation* yang berarti kerja sama. Bapak koperasi Indonesia sendiri, yaitu Moh. Hatta mendefinisikan koperasi sebagai sebuah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Namun UU Nomor 17 tahun 2012 tidak berlaku kembali sejak tahun 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. UU Nomor 17 tahun 2012 dianggap tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha

bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru. Pengertian koperasi Mengacu pada UU No.25 tahun 1992 sendiri adalah koperasi merupakan badan usaha perseorangan atau badan hukum koperasi dengan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.2 Fungsi, Peran, dan Prinsip Koperasi

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di antaranya adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan prinsip koperasi di antaranya adalah:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

2.1.3 Jenis Koperasi

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Koperasi sendiri dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Koperasi Primer adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder adalah semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi, baik Badan Hukum Koperasi Primer dan atau Badan Hukum Koperasi Sekunder.

2.2 Gambaran Umum Laporan Keuangan

Mengacu pada Warren et al. (2014) laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang memberikan informasi mengenai transaksi perusahaan yang telah dicatat dan diikhtisarkan. Kieso et al. (2018:28) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: *“Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it.”* yang berarti laporan keuangan adalah sarana utama yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak di luarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan akuntansi yang dibuat untuk

memberikan informasi mengenai informasi keuangan yang telah dicatat dan diikhtisarkan kepada pihak luar.

Mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015:3) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Kasmir (2013:10) dalam bukunya yang berjudul *Analisis Laporan Keuangan* mengungkapkan secara rinci tentang tujuan dari pembuatan laporan keuangan, di antaranya adalah:

- Media informasi mengenai jenis dan total aktiva (harta) yang terdapat pada suatu perusahaan.
- Media informasi mengenai jenis dan total kewajiban serta modal pada suatu perusahaan yang dimiliki.
- Media informasi mengenai jenis dan total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu.
- Media informasi mengenai jenis dan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu.
- Media informasi mengenai kinerja manajemen dalam perusahaan pada periode tertentu.
- Media informasi mengenai catatan-catatan yang terdapat pada laporan keuangan.

2.3 Gambaran Umum SAK ETAP

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang khusus difungsikan untuk digunakan oleh entitas kecil, menengah, atau entitas yang tidak memiliki akuntabilitas untuk publik atau secara luas. IAI (2009) menjelaskan bahwa SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturannya lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Dalam SAK ETAP (2009), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.

Sedangkan entitas dapat dikatakan memiliki akuntansi jika:

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

2.3.2 Definisi Posisi Keuangan dan Kinerja Keuangan

SAK ETAP (2009) menjelaskan bahwa posisi keuangan adalah gambaran dari suatu kondisi keuangan pada periode tertentu yang disajikan dalam bentuk aset, kewajiban, dan ekuitas . SAK ETAP (2009) mendefinisikan unsur-unsur posisi keuangan sebagai berikut:

- a) Aset adalah semua sumber daya ekonomi atau suatu kekayaan yang dimiliki suatu entitas dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan yang dapat diukur dalam satuan uang.
- b) Kewajiban merupakan tanggung jawab masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya entitas.
- c) Ekuitas adalah modal perusahaan yang hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Menurut SAK ETAP (2009) kinerja keuangan adalah hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi. Laba merupakan faktor yang sering dianggap menjadi tolak ukur dari kualitas suatu perusahaan. SAK ETAP (2009) mendefinisikan penghasilan dan beban sebagai berikut:

- a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan dalam bentuk arus keluar atau penurunan aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal.

2.3.3 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses membentuk suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas; dan
- b) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam SAK ETAP didasarkan pada prinsip pervasif dari Kerangka Dasar Penyajian dan Pengukuran Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK ETAP untuk transaksi atau peristiwa lain. Laporan keuangan harus disusun oleh entitas, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

Pengakuan pada komponen-komponen keuangan di antaranya adalah:

a) Aset

Aset diakui dalam neraca jika di masa depan kemungkinan manfaat ekonominya akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika telah terjadi pengeluaran dan manfaat ekonominya dianggap tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b) Kewajiban

Kewajiban dapat diakui dalam neraca jika terdapat kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini atau jangka pendek dan nilai yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c) Penghasilan

Pengakuan penghasilan adalah akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d) Beban

Pengakuan beban terjadi karena akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika terdapat penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan depresiasi aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e) Laba atau Rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmetika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukanlah merupakan unsur yang terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan. SAK ETAP tidak memberikan izin untuk pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi syarat definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “*matching concept*”.

Kegiatan saling menghapus tidak diperbolehkan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK ETAP.

- a) Pengukuran nilai aset secara neto dari penilaian penyisihan bukan merupakan saling hapus, misalnya penyisihan atas keusangan persediaan dan penyisihan atas piutang tak tertagih.
- b) Jika aktivitas entitas yang normal tidak termasuk membeli dan menjual aset tidak lancar (termasuk investasi dan aset operasional), maka entitas memberikan laporan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset dengan mengurangi hasil penjualan dengan jumlah tercatat aset dan beban penjualan yang terkait.

2.3.4 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran didefinisikan sebagai proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur nilai aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah:

- a) Biaya historis merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
- b) Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.4 Penyajian Laporan Keuangan Mengacu pada SAK ETAP

2.4.1 Penyajian Wajar

Laporan keuangan memberi penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar memberi syarat penyajian jujur atas pengaruh suatu transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan dapat diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

2.4.2 Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Entitas Suatu entitas yang laporan keuangannya mentaati SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved*

statement) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak dapat menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

2.4.3 Kelangsungan Utama dan Frekuensi Pelaporan

Ketika menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP menyusun sebuah penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang memungkinkan kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, apabila manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Apabila entitas tidak membuat laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha. Entitas menunjukkan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.

2.4.4 Laporan Keuangan Lengkap Mengacu pada SAK ETAP

Laporan keuangan entitas meliputi:

a) Neraca

Mengacu pada SAK ETAP (2009), neraca adalah suatu laporan yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.

b) Laporan Laba Rugi

Mengacu pada SAK ETAP, laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan kinerja keuangannya selama periode tersebut dengan menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.

c) Laporan Perubahan Ekuitas:

Mengacu pada SAK ETAP (2009), Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut. Laporan Perubahan Ekuitas harus menunjukkan:

- i. Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
- ii. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;

d) Laporan arus kas

Mengacu pada SAK ETAP (2009), laporan arus kas adalah laporan yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan Mengacu pada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Mengacu pada SAK ETAP, laporan arus kas berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Karena mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama.